

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan permasalahan pokok yang dialami oleh semua negara. Menurut Bank Dunia (2000) dalam Akbar (2015), definisi kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (*well-being*) yang artinya kondisi serba kekurangan yang mengakibatkan seseorang tidak mampu mencapai derajat hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan (Cahyat, 2004). Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

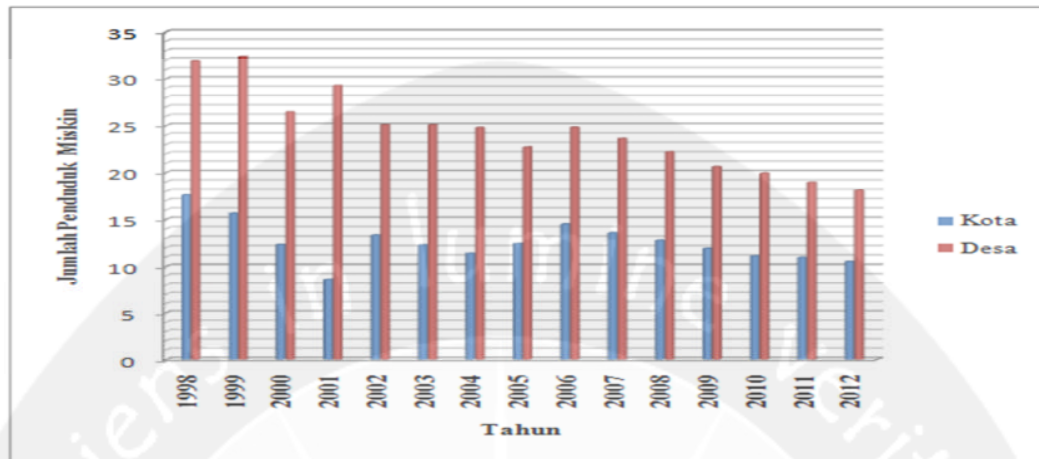
Kemiskinan menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pada akhirnya berpengaruh terhadap ketidakmampuan memenuhi kebutuhan gizi. Hal ini menyebabkan adanya penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Selain berdampak pada kesehatan, kemiskinan juga mengakibatkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pendidikannya. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat semakin tidak mampu

bersaing dalam angkatan kerja. Pada akhirnya terciptalah pengangguran, dan masyarakat miskin tidak dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan juga memberikan dampak di bidang sosial, seperti kecemburuan dan tindak kriminal, sehingga dapat dikatakan bahwa kemiskinan menciptakan kondisi yang tidak aman dalam masyarakat. Oleh karena kemiskinan merupakan masalah global, maka pemerintah berupaya untuk menanggulangnya dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs merupakan hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berupa delapan butir tujuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Delapan butir tujuan tersebut yaitu (Kuncoro, 2013):

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,
- 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua,
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
- 4) Menurunkan angka kematian anak,
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu,
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya,
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup,
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Gambar 1.1 merupakan gambar perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang menunjukkan hasil pencapaian MDGs dari tahun 1998 hingga 2012.

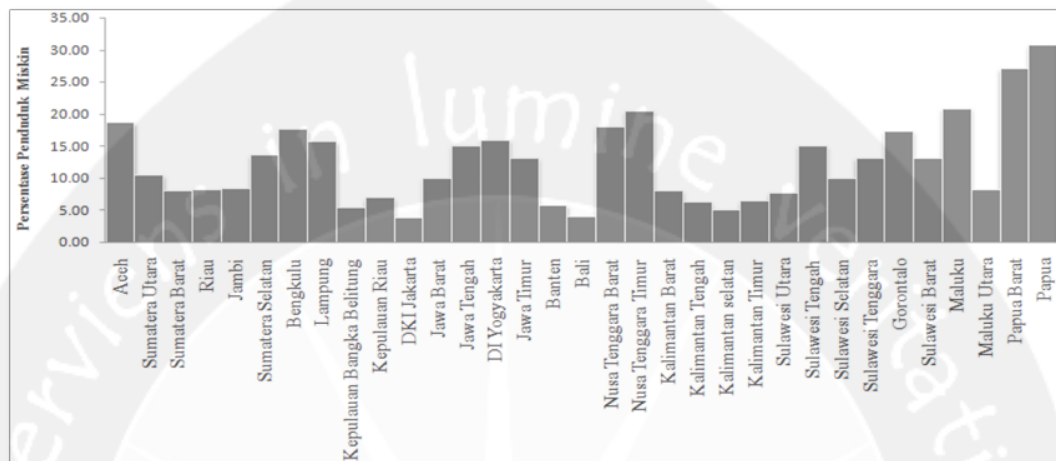


Sumber: Badan Pusat Statistik, (2012)

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1998-2012**

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia baik di perkotaan maupun pedesaan mengalami penurunan. Secara umum wilayah pedesaan merupakan penyumbang angka kemiskinan yang lebih besar daripada wilayah perkotaan. Persentase penduduk miskin paling tinggi berada di wilayah Indonesia Timur. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara tingkat kemiskinan Indonesia Timur dan tingkat kemiskinan di wilayah Indonesia Barat. Hal ini dipengaruhi oleh lokasi geografis dan faktor konektivitas. Berdasarkan faktor konektivitas, wilayah Indonesia Timur khususnya Papua, masih tergolong sulit dijangkau sehingga aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tergolong sulit untuk berkembang. Faktor lainnya adalah masalah tingkat isolasi. Ada beberapa daerah di Papua yang terisolasi dari peradaban, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata (Istman,

2012). Berikut merupakan gambar yang menunjukkan persentase penduduk miskin di Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2012.



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2012)

**Gambar 1.2**  
**Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2012**

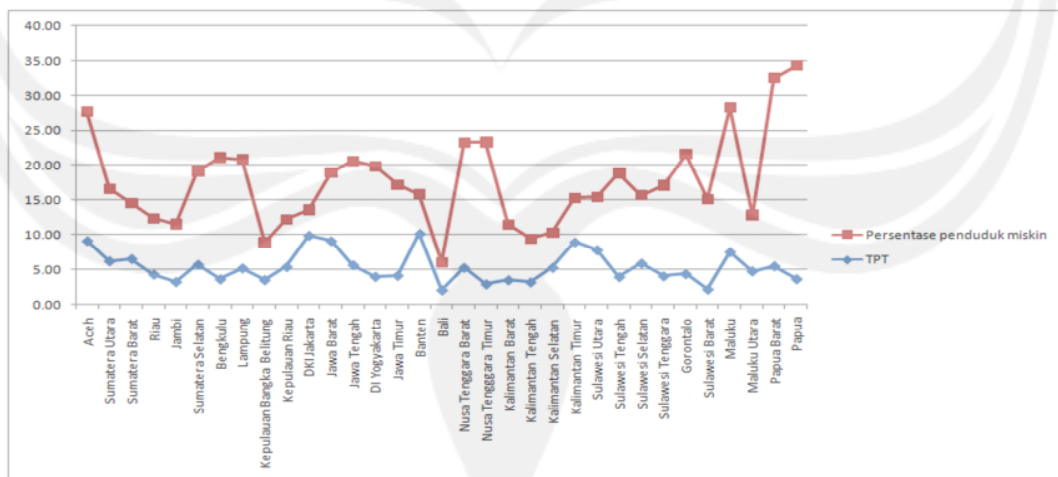
Gambar 1.2 menunjukkan bahwa terdapat tiga provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi yaitu Papua, Papua Barat, dan Maluku, sedangkan tiga provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Selatan. Menurut Bank Indonesia (2014) dalam Sandy (2014), hal lain yang berpengaruh terhadap tingginya kemiskinan di wilayah Indonesia Timur adalah masih rendahnya Upah Minimum Regional (UMR) jika dibandingkan dengan angka kebutuhan hidup layak, terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya kenaikan pendapatan

dalam suatu wilayah. Peningkatan pendapatan tersebut mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga konsumsi akan barang dan jasa juga meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi barang dan jasa tersebut, maka dibutuhkan adanya peningkatan produksi seiring dengan kenaikan konsumsi yang terjadi. Proses peningkatan produksi membutuhkan peningkatan faktor produksi, salah satunya adalah faktor tenaga kerja. Penambahan kuantitas faktor tenaga kerja, secara tidak langsung menunjukkan bahwa jumlah orang yang terserap untuk bekerja meningkat sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran. Angka kemiskinan akan mengalami penurunan seiring terjadinya penurunan jumlah pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, 2004).

Peningkatan daya beli dan konsumsi yang diimbangi dengan peningkatan produksi akan menciptakan kondisi di mana setiap kebutuhan konsumsi mampu terpenuhi. Kondisi tersebut akan berbeda ketika peningkatan konsumsi tidak disertai dengan pemenuhan barang dan jasa, dengan kata lain produksi tidak meningkat. Produksi yang tidak meningkat mengakibatkan barang dan jasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau permintaan sehingga memicu kenaikan harga-harga atau disebut sebagai inflasi. Ketika semua harga meningkat, secara otomatis daya beli riil masyarakat menjadi turun, Penurunan daya beli ini memaksa masyarakat mengurangi jumlah konsumsinya. Jika harga terus menerus mengalami kenaikan, pemenuhan barang dan jasa akan menurun. Hal ini menyebabkan semakin banyak masyarakat yang masuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan.

Dampak tidak adanya peningkatan produksi, juga akan berpengaruh terhadap permintaan jumlah faktor produksi. Salah satu penurunan permintaan faktor produksi adalah penurunan permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja mengalami penurunan sehingga kesempatan kerja bagi masyarakat semakin menurun pula, akhirnya hal ini menimbulkan masalah baru yaitu pengangguran. Akibat menganggur, masyarakat tersebut menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga masyarakat jatuh miskin. Pengangguran merupakan permasalahan yang selalu ditemui di setiap wilayah. Besarnya angka pengangguran berbeda di setiap wilayah dan memberikan dampak yang berbeda terhadap tingginya angka kemiskinan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh Gambar 1.3 di mana terdapat pola besarnya pengangguran dan kemiskinan provinsi di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2012)

**Gambar 1.3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Penduduk Miskin 33 Provinsi**  
**di Indonesia Tahun 2012**

Keterangan: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 1.3 menunjukkan kenyataan bahwa provinsi yang memiliki pengangguran tinggi tidak memiliki kemiskinan yang tinggi pula. Provinsi tersebut yaitu Banten dan DKI Jakarta. Provinsi dengan tingkat pengangguran rendah namun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu provinsi Papua Barat dan Papua. Di sisi lain terdapat provinsi dengan pengangguran tinggi dan kemiskinan tinggi, yaitu provinsi Maluku.

Pendidikan seorang tenaga kerja turut memberikan pengaruh terhadap tingginya kemiskinan. Teori *Human Capital* mengatakan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar pendapatan yang diperoleh (Todaro dan Smith, 2011). Seorang tenaga kerja dengan pendidikan yang tinggi akan memiliki produktivitas yang tinggi dalam menghasilkan barang dan jasa. Melalui produktivitasnya yang tinggi tersebut maka seseorang yang memiliki pendidikan tinggi mampu memperoleh pendapatan yang tinggi pula. Pendapatan yang tinggi membuat daya beli masyarakat meningkat sehingga kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Kebutuhan dasar yang mampu terpenuhi tersebut menghindarkan masyarakat dari garis kemiskinan.

Salah satu wujud nyata kebijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan produktivitas masyarakat melalui sektor pendidikan, yaitu mewajibkan kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti program wajib belajar dua belas tahun. Program ini mewajibkan masyarakat untuk menuntaskan pendidikannya minimal sampai pada jenjang SMA/ sederajat. Berdasarkan data angka partisipasi pendidikan masyarakat

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2005 hingga 2012 menunjukkan adanya peningkatan jumlah lulusan SMA. Rata-rata lulusan SMA naik sebesar 8 % di setiap provinsi. Oleh karenanya perbaikan pendidikan melalui program ini diharapkan akan membantu dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan telah dilakukan dan sebagai hasilnya, angka kemiskinan pada setiap provinsi telah berkurang. Penurunan angka kemiskinan tersebut berjalan lambat sehingga jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kemiskinan pada setiap provinsi di Indonesia masih termasuk tinggi. Sebagai contoh yaitu provinsi Papua yang berperan sebagai penyumbang angka kemiskinan paling besar. Papua memiliki angka kemiskinan yang paling tinggi akan tetapi memiliki laju PDRB yang tinggi. Selain itu Papua memiliki tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan persentase lulusan SMA yang rendah, sedangkan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah seperti Bali, memiliki laju inflasi yang rendah, pendidikan yang tinggi, tingkat pengangguran terbuka yang rendah serta laju PDRB konstan dalam kisaran angka 5-6 %.

Analisis terhadap faktor-faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan pendidikan yang persentasenya berbeda di setiap provinsi, berguna untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut memiliki peran dalam naik dan turunnya tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia?
- 2) Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia?
- 3) Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan provinsi Indonesia?
- 4) Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- 1) Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia,
- 2) Mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia,
- 3) Mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia,
- 4) Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Pembaca, sebagai pengetahuan dan atau informasi mengenai permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia,
- 2) Pemerintah, sebagai salah satu referensi mengenai kemiskinan sehingga dapat dijadikan suatu acuan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

#### **1.5. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia.
- 2) Inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia.
- 3) Pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia.
- 4) Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia.
- 5) Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Pengangguran, dan Pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam 5 bab, dengan rincian sebagai berikut:

**Bab I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori dan studi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

**Bab III          METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, model yang digunakan dalam penelitian, dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian, dan batasan operasional.

**Bab IV          HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil analisis data yang diperoleh dari perhitungan dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

**Bab V           PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pemerintah.